

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Nilai

Pada hakikatnya nilai adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek, jadi bukan objek itu sendiri yang dijadikan nilai. Arti nilai yang disampaikan oleh Sutoyo dkk (2020: 86) adalah sesuatu yang berharga, bermutu, berkualitas dan berguna bagi manusia. Segala sesuatu itu juga dapat bernilai tergantung nilai seperti apa yang ada dan bagaimana keterkaitannya hubungan nilai tersebut bagi kehidupan manusia. Hubungan nilai bagi kehidupan manusia tentu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Margono (Yanto, 2016: 36) mengatakan bahwa “nilai adalah apa yang dianggap bernilai atau berharga yang dijadikan sebagai suatu landasan, pedoman, dan semangat oleh seseorang dalam menjalankan sesuatu”. Nilai menjadi sesuatu yang bermanfaat sebagai pedoman umum bagi manusia dalam melakukan atau menilai baik/buruknya suatu tindakan dalam kehidupannya. Setiap individu dapat diterima oleh masyarakat dengan baik apabila mematuhi aturan-aturan yang berlaku didalam lingkungannya. Sedangkan menurut Chairiyah (2010: 56) “nilai adalah suatu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia”. Nilai juga dapat berupa norma, perilaku, etika, peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang yang menjalaninya. Sehingga, nilai bagi manusia dipakai sebagai landasan, pedoman dan motivasi dalam segala hal sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapannya.

Menurut beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah suatu bentuk penghargaan dan sebuah tatanan yang bermanfaat sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan dan menilai sesuatu terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan seorang individu agar memiliki batasan baik dan buruk dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai hidup

seseorang dapat menggambarkan kualitas pribadinya yang tercermin dalam bermasyarakat dan berperilaku, baik perilaku terhadap diri sendiri atau terhadap oranglain dan lingkungannya.

2. Pengertian Pancasila

a. Pancasila

Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang mengandung lima dasar atau lima asas negara yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi dan memiliki nilainya masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari berbagai budaya luhur Indonesia yang menggambarkan bahwa Pancasila menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa yang seutuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulianti dkk (2020: 60) yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini akan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya untuk diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sehingga menjadi suatu bagian yang penting bagi bangsa Indonesia yang harus dipahami dan dilaksanakan karena menjadi satu-satunya landasan yang paling utama dan sebagai pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Setiap sila Pancasila terdapat suatu cita-cita, tujuan dan harapan bangsa Indonesia. Tiap-tiap silanya saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadikannya sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita harapan bangsa. Sangat sesuai dengan sembojannya yakni *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila menjadi sumber cita-cita, moral bangsa dan menjadi bentuk budaya Indonesia. Demikian itu, keberadaan Pancasila dalam diri bangsa dianggap sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dengan penjelasan yang disampaikan berikut ini.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian, yang didalamnya meliputi cita-cita hukum. Sehingga, Pancasila menjadi sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan memahami dasar negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Karena itulah, Pancasila menjadi kekuatan yang mengikat secara hukum (Ningsih, 2021: 2).

Sebagai dasar negara Pancasila juga menunjukkan jati diri dan keberadaannya sebagai alas ataupun fundamen berdirinya bangsa Indonesia sehingga semuanya yang terkait dengan hal-hal perikehidupan harus berdasarkan Pancasila (Bo'a & RW, 2019: 80). Kedudukan Pancasila selain sebagai dasar negara, juga sebagai nilai-nilai yang dihidupkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan setiap sila-sila yang tercantum dalam Pancasila memiliki makna penting dalam mengatur cara berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang pada nilai-nilai Pancasila.

Demikian Pancasila menjadi sebuah ideologi bangsa yang bukan hanya berasal dari pemikiran seseorang akan tetapi diambil dari nilai-nilai, adat-istiadat, kebudayaan dan agama masyarakat Indonesia. Sebagaimana dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok sebagaimana ideologi-ideologi lain didunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia(Pratikno dkk., 2019: 87).

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat diartikan sebagai sebuah pandangan hidup bangsa dan pedoman dalam menjalankan segala perikehidupan dalam hal ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Pancasila menjadi arah dalam bertindak dan berperilaku bagi warga negara Indonesia sesuai norma dan hukum negara yang berlaku.

Pancasila perlu diterapkan agar tercapainya suatu cita-cita bangsa yang akan tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Nilai-nilai dalam Pancasila

Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan sebuah nilai yang harus di implementasikan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dibidang pendidikan, seni, budaya, hukum, ekonomi, politik dan kemasyarakatan. “Nilai-nilai Pancasila adalah sumber dari karakter bangsa, nilai-nilai kebudayaan dan pendidikan yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat luar, tanpa terkecuali khususnya peserta didik yang akan menjadi generasi muda bangsa Indonesia” (Sulianti dkk., 2020: 60). Adapun nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut ini.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan merupakan nilai yang berkaitan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memeluk agama yang dianutnya. Untuk itu, bangsa Indonesia memberi kebebasan pada setiap warganya dalam menyembah Tuhannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam sila ini mengandung pemahaman secara luas terhadap segi keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksudnya bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga, hak dan kewajiban beragama memiliki tempat yang sama dalam Pancasila sebagai masyarakat yang berketuhanan.

Pada hakikatnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara hendaknya

mengakui adanya Tuhan. Sila pertama dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang religius, adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dicerminkan dalam berperilaku seperti berdo'a sebelum melakukan dan sesudah aktivitas, melaksanakan kewajiban beribadah, saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing. Di sisi lain, dengan tegas menyatakan bahwa sila ketuhanan mengandung dimensi moral yang berupa nilai *religius* dan spiritualitas yang akan mendekatkan diri manusia kepada sang pencipta dan taat pada ajaran agama yang dianutnya (Surbaini & Reja, 2018: 222). Karena dengan begitu manusia diharapkan dapat menjalankan sesuatu dengan baik dan benar. Sebagaimana menurut Moh. Hatta dkk (Bo'a & RW, 2019: 37) yang menegaskan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi suatu dasar dalam memimpin di jalan kebenaran, dengan menjadi fundamennya.

Sesuai dengan dasar diatas, maka pemerintah hendaknya tidak menyimpang dari jalan yang benar dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Pancasila berguna untuk mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu dasar dalam bernegara yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia agar tercapainya kesejahteraan dalam bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai religius dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Yang didalamnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memilih agama sesuai keinginannya. Dalam artian membebaskan pemeluk agama sesuai dengan

keyakinannya, tidak adanya suatu unsur paksaan dan antar pemeluk agama yang berbeda harus saling menghormati dan saling toleransi agar sesuai dengan jalan kebenaran dalam mengejar kebaikan.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu adanya nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keadaban. Menurut Bo'a & RW (2019: 41) menyampaikan bahwa "hakikat dan tujuan dari kemanusiaan bagi bangsa Indonesia bahwa kemanusiaan yang kita junjung adalah kemanusiaan yang berdasar pada psinsip keadilan dan keberadaban bukan atas dasar persamaan SARA (suku, adat, ras dan agama)". Pada sila ini diharapkan masyarakat dan bangsa Indonesia senantiasa saling menyayangi, menghormati dan mencintai kepada sesama didalam maupun luar Indonesia tanpa adanya saling membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Sehingga, dapat mencerminkan masyarakat yang saling rukun, memiliki rasa toleransi, rasa peduli terhadap sesama, saling berlaku adil kepada semua orang. Menjadikan setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama tanpa terkecuali serta menjamin hak dan kebebasan yang berhubungan baik dengan Tuhan, orang, negara maupun masyarakat. Menurut Nurdiaman dan Setijo (Firdaus & Anwar, 2020) menyatakan sebagaimana berikut:

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, baik hak maupun kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan keturunan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dikaitkan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana sila kedua bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dalam kehidupannya manusia harus hidup

berdampingan dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Sehingga sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka dari itu sebagai manusia haruslah memiliki moral agar dapat hidup berdampingan dengan yang lain dalam tatanan bernegara di Indonesia.

Sila kedua ini memberikan hak asasi yang bersifat mutlak bagi rakyat Indonesia. Menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara yang memiliki hukum adil, negara yang berbudaya dan beradab. Mengenai hal itu penjelasan berikut ini menyatakan:

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun konstektual dalam pengertian pertama, mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara, masyarakat, melainkan karena pemberian sang pencipta(Rohani, 2019: 153).

Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara terutama dalam peraturan undang-undang dasar negara harus mewujudkan tercapainya suatu tujuan dalam meninggikan harkat dan martabat manusia, terutama hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia harus dijamin dalam peraturan undang-undang dasar negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai keadaban dimana setiap rakyat Indonesia berhak menjalankan kehidupannya sesuai dengan hak asasi sebagai manusia, memperoleh hak yang sama tanpa adanya perbedaan latar belakang maupun status sosial. Setiap masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama dalam membela hak yang dimiliki. Sehingga

rakyat memiliki kewajiban dan hak yang sama dimata hukum yang berlaku di Indonesia. Sila ini juga harus dibarengi oleh adanya nilai-nilai religius dalam pelaksanaannya. Untuk itu, dapat diwujudkan sebagai masyarakat Indonesia yang berlaku adil sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang beradab.

3) Persatuan Indonesia

Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa bangsa dalam satu kesatuan dan memiliki rasa persaudaraan. Adapun nilai yang terkandung dalam sila ini mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibutuhkan sikap saling menghargai dan menjunjung semangat persatuan demi keutuhan negara. Didalam persatuan Indonesia harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara dari pada kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan Sarbaini & Reja (2018: 224) yang menyatakan bahwa hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama-sama sebagai warga negara yang berprinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, yang mensatukan masalah bangsa diatas kepentingan individu. Sehingga sila ini sangat penting ditumbuhkan dalam diri masyarakat. Mencerminkan jiwa solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air dan nasionalis demi kemajuan negara kearah yang lebih baik.

Sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia harus menjadi satu kesatuan meskipun ada banyak perbedaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Hanafi (2018: 59) menjelaskan bahwa sila persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah atau bersatunya berbagai perbedaan suku, agama, golongan dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai banyak perbedaan seperti suku bangsa, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Sehingga persatuan antara setiap bangsa Indonesia sangat diperlukan. Demi tercapainya kehidupan bernegara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan perdamaian abadi. Mengikat berbagai keberagaman menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dengan demikian, makna yang paling hakiki dari persatuan Indonesia yaitu adanya rasa saling memiliki, saling mengikat satu dengan yang lain antar bangsa Indonesia (Fais Yonas & Sri Handayani, 2019: 43).

Membicarakan sila persatuan tidaklah bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Dengan nilai persatuan Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri bangsa. Sehingga, nilai ini merupakan suatu proses akan terwujudnya nasionalisme. Menurut Krissantono (Syamsudin dkk, 2009: 55) pada hakekatnya sila persatuan Indonesia mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air serta menggalang persatuan bangsa. Demikian itu, persatuan bangsa tidaklah membuat kita terpecah belah meskipun adanya banyak perbedaan. Hal ini dikarenakan dengan perbedaan tersebut menjadikan identitas dan ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga kita harus bersatu agar keutuhan negara tetap terjaga. Sesuai dengan semboyan Pancasila '*Bhinneka Tunggal Ika*' yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu diperlukan sebuah kerjasama seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sila persatuan Indonesia bertujuan untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari beragam perbedaan. Sila ini dapat menumbuhkan nasionalisme dalam diri bangsa untuk kebaikan bersama. Sehingga diharapkan dapat terhindar dari berbagai konflik atau perpecahan dalam bangsa Indonesia karena perbedaan yang dimiliki.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini

mengandung makna sistem pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Syamsudin dkk (2009: 56) menjelaskan bahwa sila keempat memiliki arti sistem pemerintahan rakyat melalui badan-badan tertentu dalam mencapai kemufakatan, sesuai dengan akal sehat dan memikirkan setiap kehendak serta rasa kemanusiaan demi kebaikan bersama. Setiap rakyat mengambil keputusan melalui musyawarah dalam mencapai mufakat. Sehingga musyawarah adalah pilihan yang sesuai untuk kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk ikut terlibat baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam sistem pemerintahan. Setiap rakyat harus saling menghargai, menghormati dan menerima pendapat yang telah disampaikan.

Sila keempat ini juga sering disebut dengan ‘demokrasi’ dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia menganut sistem negara demokrasi dalam memecahkan masalah dengan adil dan jujur. Menurut Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa secara umum, demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan dan kejujuran. Demokrasi menunjukkan bahwa negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Sehingga pada sila ini setiap rakyat berhak menuangkan aspirasi dan terlibat dalam menentukan segala keputusan melalui suara dan pendapat. Selain itu, dalam sistem ini tidaklah boleh mengambil keputusan demi kepentingan pribadi. Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsudin dkk (2009: 56) bahwa dalam mewujudkan nilai demokrasi Pancasila, semua manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena

itu, dalam menggunakan haknya setiap individu harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah sebuah sistem pemerintahan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan bersama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap rakyat memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia melalui pemerintah yang demokratis.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dengan adil dalam kehidupan baik dibidang agama, suku, hukum, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai keadilan sosial. Menurut Syamsudin dkk (2009: 58) bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia wujud pelaksanaannya yaitu warga harus mengembangkan sikap dan perilaku adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, menyesuaikan keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sehingga keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bersama dalam negara ini.

Hal ini menunjukkan bahwa sila kelima memiliki perlakuan hukum dalam negara Indonesia yang tidak dibeda-bedakan, semua memiliki hak yang sama dan berhak mendapatkan hukum yang adil secara merata. Jadi, untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang adil agar dapat menjalankan sila ini perlu adanya kesadaran dalam diri sendiri untuk berperilaku adil didalam kehidupan dan dapat menerapkan nilai keadilan sosial di

masyarakat. Sudaryanto (Untari dkk, 2020: 26) menjelaskan bahwa nilai-nilai keadilan sosial mengandung beberapa prinsip asasi diantaranya (1) Keadilan, (2) Keadilan sosial, (3) Kesejahteraan lahir dan batin, (4) Kekeluargaan. Sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya. Karena pada sila ini menjamin akan hidup yang layak sesuai dengan kodrat manusia. Demikian kehidupan masyarakat akan terjamin dengan hidup yang damai dan sejahtera.

Membicarakan sila kelima ini, dapat pula dimaknai bahwa karakter keadilan sosial menumbuhkan kembangkan sikap dan perbuatan luhur yang tercermin dalam suasana kekeluargaan dan saling gotong royong. Selain berbuat adil pada sesama juga harus menghormati hak orang lain, saling tolong menolong pada sesama tanpa membeda-bedakan, suka bekerja keras, dan giat melaksanakan kegiatan sosial guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia demi kemajuan yang merata. Sehingga pemerintah berkewajiban dalam mengayomi seluruh warganya agar mendapatkan setiap hak dan melakukan kewajibannya. Demikian perlakuan yang adil dalam setiap keadaan sangat penting dalam melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena dalam mewujudkan setiap harapan bangsa sangat dibutuhkan bangsa yang kuat agar dapat menopang seluruh harapan bangsa dan negara. Seperti yang kita telah ketahui bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga dibentuknya Pancasila mampu menjadikan bangsa dan negara berjalan dengan aman dan sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sila keadilan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warganya berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga warga negara Indonesia dapat hidup dengan rukun dan

merasa aman dalam melakukan kewajibannya serta mematuhi setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, dapat mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

c. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002: 70). Berdasarkan definisi tersebut maka implementasi nilai-nilai Pancasila adalah suatu pengamalan nilai-nilai yang dilaksanakan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas. Penerapan nilai-nilai setiap butir Pancasila harus diajarkan pada peserta didik agar setiap individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur budaya bangsa Indonesia dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan dan kenegaraan. Segala hal yang ada diatur berdasarkan aturan-aturan agama. Implementasi sila pertama dalam pendidikan merupakan suatu hal akan pentingnya spiritual bagi peserta didik agar menjadikan peserta didik tidak lupa pada maha pencipta-Nya (Sulianti dkk., 2020: 63). Agama merupakan sesuatu yang berpengaruh besar bagi peserta didik dalam membangun moral kearah yang lebih baik demi tercapainya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan dan dilingkungan masyarakat yang akan memberikan dampak bagi kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Sehingga agama menjadi sebuah pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun moral peserta didik. Sedangkan pendapat Asmaroini

(Fasikha, 2018: 8) menyatakan bahwa dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan akan tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sikap toleransi juga merupakan sebuah contoh dari implementasi sila pertama Pancasila yang berarti harus saling menghormati atas kepercayaan dan keyakinan masing-masing terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penerapan dalam sila pertama pancasila dapat dilakukan dengan menghormati adanya setiap perbedaan yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat Indonesia baik di lembaga pendidikan maupun masyarakat, menciptakan kehidupan yang rukun, tidak memaksakan suatu agama dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Pada sila pertama ini yang mencakup nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa pada lembaga pendidikan dapat dinyatakan dengan selalu tertib dalam menjalankan ibadah, berdo'a bersama, membaca kitab suci, tidak berbohong kepada guru maupun teman, percaya pada kemampuan sendiri dalam melaksanakan apapun, karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap makhluk-Nya.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur dalam kaitannya kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Pada lembaga pendidikan implementasi sila kedua yaitu pemerintah sudah memberikan yang terbaik dan mengupayakan lembaga pendidikan di Indonesia dengan tanpa adanya kekerasan dalam pembelajaran (Sulianti dkk., 2020: 63). Adapun juga implementasi dari sila kedua yaitu dengan menanamkan rasa toleransi pada orang lain, saling menghormati kepada orang lain walaupun memiliki perbedaan yang beragam antar masyarakat, dan selalu bersikap adil

terhadap sesama tanpa membeda-bedakan (Nurafifah & Dewi, 2021: 5). Pada sila kedua Pancasila ini harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, peduli terhadap sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, menyamakan derajat manusia sehingga dapat tercipta suasana kekeluargaan. Sebagaimana pendapat Sudaryanto (Fasikha, 2018: 8) tentang arti kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila yang memiliki makna kekeluargaan antar bangsa.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas nilai kemanusiaan yang mencakup dalam sila kedua ini mencerminkan masyarakat agar menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan dan status sosial agar tercipta masyarakat Indonesia yang hidup rukun dan makmur. Penerapan dan pelaksanaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lembaga pendidikan dapat dinyatakan dengan menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membedakan dalam berteman, saling berbagi satu dengan yang lain serta hormat dan patuh kepada guru dan orang tua.

3) Persatuan Indonesia

Pada sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia mengandung nilai yang mengutamakan persatuan, persaudaraan dan kerukunan. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengutamakan rasa persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi. Diatas kepentingan pribadi ini dapat membangun rasa nasionalisme yang berarti rela dan harus berkorban demi bangsa yang dilandasi rasa cinta tanah air dan bangsa dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi sila ketiga dalam pendidikan yaitu dengan adanya perwujudan dalam perubahan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila

dalam mempersatukan seluruh warga yang terdapat dalam lembaga pendidikan (Sulianti dkk., 2020: 63). Adapun sila ketiga ini dapat di implementasikan dengan menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada rasa kesatuan sebagaimana semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan (Nurafifah & Dewi, 2021: 5). Persatuan Indonesia memiliki makna yang berarti harus bersatu dan saling tolong-menolong.

Berdasarkan uraian diatas maka persatuan Indonesia mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memiliki kewajiban dalam membela serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa di Indonesia. Penerapan dalam pelaksanaan sila ketiga di lembaga pendidikan dapat dinyatakan dengan membudayakan kegiatan gotong royong dalam piket, bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan suasana saling tolong-menolong dalam kondisi apapun, sehingga dengan sila ketiga Pancasila ini masyarakat Indonesia dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pada sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan mengandung nilai prinsip berdemokrasi. Demokrasi dalam sila keempat ini mencakup beberapa arti yaitu kewarganegaraan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sila keempat ini mengutamakan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat (Nurafifah & Dewi, 2021: 5). Pada lembaga pendidikan implementasi sila keempat dapat diwujudkan dengan adanya permusyawaratan yang

dilakukan guru-guru maupun peserta didik di lingkungan sekolah (Sulianti dkk., 2020: 11). Adapun permusyawaratan ini dilaksanakan karena adanya semangat kekeluargaan yang tercipta sebagai ciri khas bangsa dan negara Indonesia. Dari contoh sederhana ini dapat menjadi salah satu sikap yang dapat di terapkan dalam lingkungan masyarakat nantinya oleh setiap individu peserta didik. Karena mulai dari pendidikan inilah perkembangan moral peserta didik akan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian diatas penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan di lembaga pendidikan dapat dinyatakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hal ini pun dapat diwujudkan saat pembelajaran guru menerima masukan dari peserta didik dan bersikap bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, berani mengemukakan pendapat didepan umum, dan melaksanakan segala keputusan dan aturan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima adalah sila terakhir dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sebagaimana pendapat Sudaryanto (Fasikha, 2018: 9) yang menjelaskan bahwa nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung prinsip-prinsip asasi yaitu (1) keadilan; (2) keadilan sosial; (3) kesejahteraan lahir dan batin; (4) kekeluargaan. Implementasi sila kelima dari Pancasila

dalam lembaga pendidikan yaitu memberikan keadilan secara merata yang dapat diterapkan ke seluruh lembaga pendidikan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang merasa bahwa keadilan hanya untuk yang mempunyai kedudukan (Sulianti dkk., 2020: 11). Keadilan tersebut merupakan langkah awal dalam pengimplementasian dari sila kelima sebagai contoh dalam lingkungan pendidikan terutama dilingkungan sekolah dasar. Untuk itu, diperlukan kesadaran sikap yang adil dalam menjaga hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Menanamkan sikap tolong-menolong dan kerja keras demi terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka penerapan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lembaga pendidikan dalam mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial dapat dinyatakan dengan berlaku adil kepada siapapun, tidak pilih-pilih dalam berteman, suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini salah satunya yaitu Fasikha, Andriani dan Muslim yang berjudul “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Pada Siswa Kelas V Di SD Negeri 1 Kedungrandu” tahun 2018. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa siswa SDN 1 Kedungrandu umumnya sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari melalui pengamalan (1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagian besar telah membiasakan budaya mengucapkan salam, berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat dluhur berjama’ah, menghafal surat-surat pendek (2) Nilai-nilai “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sebagian besar telah melaksanakan budaya senyum, sapa dan salam, tidak memilih-milih

dalam berteman, saling tolong-menolong (3) Nilai-nilai “Persatuan Indonesia” sebagian besar telah membudayakan kegiatan gotong royong dalam piket, kegiatan rutin upacara bendera setiap hari senin, bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan (4) Nilai-nilai “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” di SDN 1 Kedungrandu yaitu yang pertama guru memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya kemudian peserta didik dapat menghargai pendapat orang lain serta menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah mufakat (5) Nilai-nilai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” diwujudkan dengan siswa tidak membeda-bedakan dalam berteman dan tidak mencontek. Penelitian ini dipilih karena adanya persamaan variable yang diteliti yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Perbedaan yang terdapat yaitu penelitian Fasikha, Andriani dan Muslim melakukan penelitian pada siswa di SD Negeri dan subjeknya siswa kelas V saja, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada siswa MI Muhammadiyah dan subjeknya kelas II,III,IV dan V dalam lingkungan sekolah dan kegiatan pembelajaran sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Penelitian yang relevan selanjutnya dengan penelitian ini yaitu Nofi Hidayati yang berjudul “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Di SD Gugus 02 Kecamatan Kotagede Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018”. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, implementasi nilai-nilai Pancasila diterapkan melalui berdo’a bersama sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, tidak memilih-milih teman, saling menghormati dan menghargai guru dan teman, bekerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok, dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dipenelitian ini yaitu tanggung jawab, jujur, bersikap adil, saling menghormati dan menghargai berbagai pendapat, rasa toleransi, dan sopan santun. Kemudian nilai-nilai tersebut diintegrasikan pada setiap komponen dalam perangkat pembelajaran. Penelitian

ini dipilih karena adanya persamaan variable yang diteliti yaitu melakukan penelitian tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Perbedaan yang terdapat yaitu penelitian Nofi Hidayati melakukan penelitian pada siswa dimulai dari muatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD dan subjeknya kelas V, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan pada keseharian siswa dalam lingkungan sekolah MI Muhammadiyah dan subjeknya kelas II, III, IV dan V.

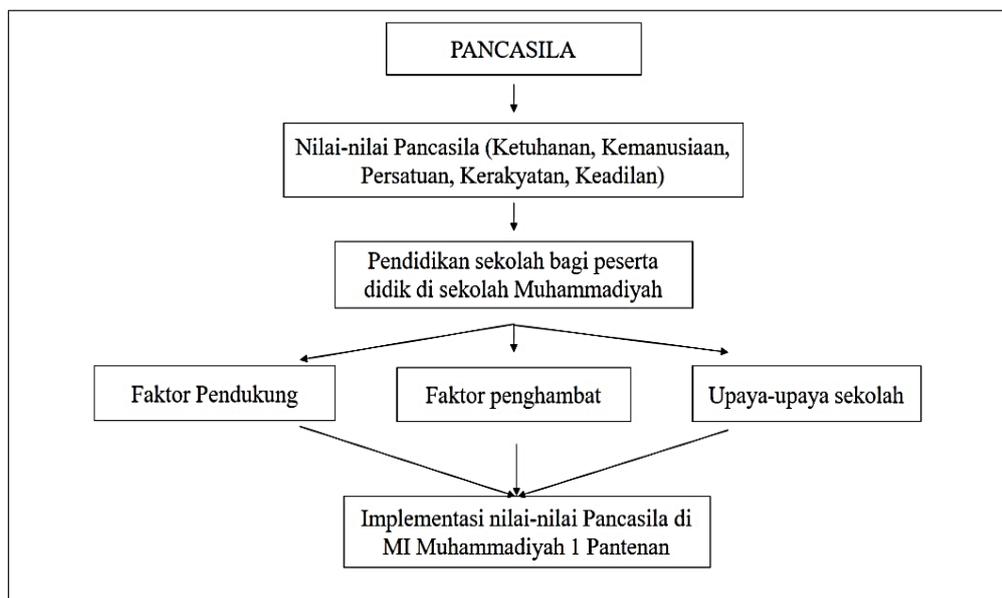
Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat terlihat pada kegiatan-kegiatan rutin disekolah maupun saat pelajaran dikelas. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mulai dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah atau berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian dapat dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat dan negara. Maka penelitian ini diambil dengan judul “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Di Sekolah Muhammadiyah (Studi Deskriptif Di MI Muhammadiyah 1 Pantenan)” yang akan mendeskripsikan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dengan berbagai pelaksanaannya, dengan harapan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila terlaksana di sekolah MI Muhammadiyah 1 Pantenan.

C. Kerangka Berfikir

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan sebuah harapan akan tercapainya suatu cita-cita bangsa dalam mengantarkan seluruh rakyat Indonesia mencapai tujuan negara. Pancasila sangat penting untuk diamalkan pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat tercapai. Untuk itu, Pancasila berperan penting dalam mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pancasila dijadikan sebagai sebuah gambaran, motivasi dan tekad identitas bangsa dalam mengembangkan karakter bangsa Indonesia terutama bagi penerus bangsa demi kearah yang lebih baik.

Salah satu cara dalam menanamkan sebuah cita-cita bangsa tersebut adalah melalui pendidikan. Pentingnya penanaman nilai Pancasila sangat tepat apabila dilakukan sejak usia dini untuk memudahkan dalam pengimplementasiannya. Hal ini bertujuan agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan setiap

tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Karena, Pancasila juga menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia maupun bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dalam jiwanya lebih mendalam. Sehingga mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia yang memiliki moral sesuai harapan bangsa.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Implementasi Nilai-Nilai Pancasila